

## Koordinasi Penanggulangan Pascabencana Gempa Bumi Berbasis Pemerintah Daerah Dan Desa: Analisis Kualitatif Di Desa Cikembang, Kabupaten Bandung, 2024

Emi Novariza<sup>1</sup>, Wiekal Kirana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Bale Bandung, Indonesia  
Email: <sup>1</sup>eminovariza1810@gmail.com, <sup>2</sup>isnandiar1908@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung dan Pemerintah Desa Cikembang dalam penanggulangan pascabencana gempa bumi tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Informan penelitian meliputi pejabat BPBD, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga terdampak. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi berjalan melalui mekanisme rapat evaluasi, pendataan kerusakan rumah, distribusi bantuan, serta pengerahan sumber daya lintas instansi. Disiplin pelaksanaan pedoman tugas berperan penting dalam memastikan ketertiban prosedural, meskipun masih ditemui kendala berupa keterbatasan fleksibilitas desa dalam menyesuaikan arahan teknis, kurangnya alat mitigasi, serta tekanan psikologis masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun struktur koordinasi telah berjalan efektif, adaptasi lokal belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk memperkuat kolaborasi BPBD desa dengan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas desa melalui pelatihan kebencanaan, penyediaan sarana mitigasi, serta pengembangan SOP tingkat desa yang lebih adaptif. Temuan penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual tata kelola bencana di wilayah pedesaan, sekaligus memperkaya literatur kebijakan publik mengenai efektivitas koordinasi antarlembaga dalam konteks keterbatasan kapasitas pemerintah daerah

**Kata Kunci:** BPBD Kabupaten Bandung, Koordinasi, Penanggulangan Pascabencana, Pemerintah Desa

### Abstrack

*This study aims to analyze the coordination between the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Bandung Regency and the Government of Cikembang Village in managing post-earthquake recovery efforts following the 2024 disaster. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and documentation involving BPBD officials, village authorities, community leaders, and affected residents. Data analysis followed the Miles and Huberman model through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that coordination was conducted through evaluation meetings, damage assessment of housing units, distribution of aid, and mobilization of cross-institutional resources. Procedural discipline played a significant role in ensuring the orderly implementation of the established guidelines, although several challenges were identified, including limited flexibility at the village level, insufficient mitigation tools, and psychological pressure on affected communities. While coordination mechanisms functioned effectively, local adaptation remained suboptimal. This study contributes to strengthening collaboration between village disaster management agencies (BPBD) by emphasizing the importance of building village capacity through disaster training, providing mitigation resources, and developing more adaptive village-level standard operating procedures (SOPs). The findings of this study are expected to contribute to the development of a conceptual framework for disaster governance in rural areas, while also enriching the public policy literature on the effectiveness of interagency coordination in the context of limited local government capacity.*

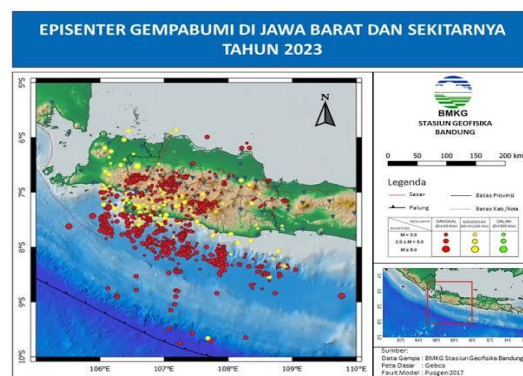
**Keyword:** Bandung Regency Disaster Management Agency, Coordination, Post-Disaster Recovery, Village Government

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah akibat posisi geografisnya yang berada pada pertemuan empat lempeng tektonik utama, yaitu Lempeng

Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan Filipina (Syafitri, 2019) (Rismawati, 2021). Kondisi geologis tersebut menjadikan Indonesia sebagai wilayah dengan tingkat aktivitas kegempaan dan vulkanisme yang tinggi (Suparno, 2025), yang secara simultan menghasilkan kesuburan lahan sekaligus kerentanan terhadap bencana alam (Angelina Br Bukit, 2025). Wilayah Indonesia masuk dalam jalur *ring of fire*, yaitu kawasan dengan intensitas gempa bumi dan letusan gunung api yang signifikan (Namyra, 2025). Secara nasional hampir keseluruhan wilayah Indonesia dikategorikan rawan bencana (Setiawan, 2022), dengan gempa bumi sebagai salah satu jenis bencana yang paling sering terjadi dan berdampak luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun infrastruktur (Lativa Qurrotaini, 2020) (Ricky Akbar, 2018).

Kerentanan tersebut menuntut peran negara melalui kebijakan penanggulangan bencana yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagai implementasinya, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang mengoordinasikan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pada tingkat daerah, BPBD menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana berdasarkan kondisi lokal yang berbeda-beda, termasuk dalam penyusunan kebijakan, edukasi masyarakat, hingga pengelolaan sumber daya dalam situasi darurat.



Gambar 1. Peta Seismisitas Titik Gempa di Jawa Barat sepanjang Tahun 2023  
Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandung, 2023

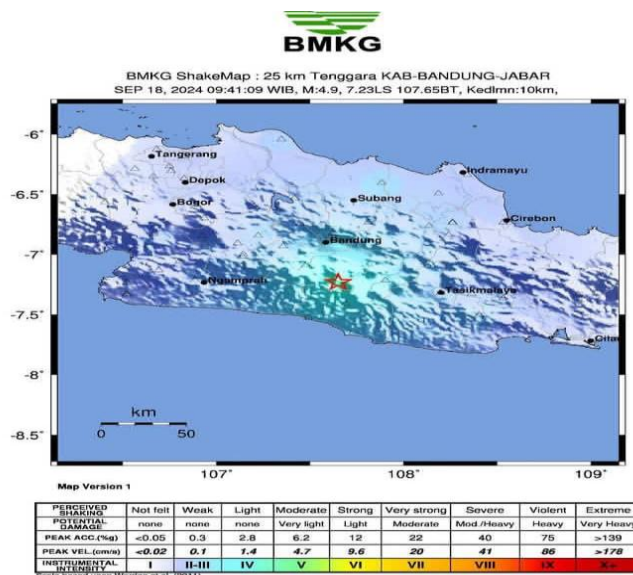
Jawa Barat sendiri merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kegempaan tinggi akibat keberadaan sesar aktif seperti Sesar Lembang dan Cimandiri serta zona subduksi di selatan Pulau Jawa (Az-Zahra Aynul Qolbi, 2024). Data BMKG mencatat 1.155 kejadian gempa bumi mengguncang Jawa Barat sepanjang tahun 2023, menjadikannya salah satu provinsi dengan frekuensi gempa tertinggi di Indonesia (Sabtaji, 2020) (Mir'atul Azizah, 2021). Kabupaten Bandung, khususnya di bagian selatan, termasuk wilayah yang rentan, seperti yang ditunjukkan oleh rentetan kejadian gempa sejak 2018 hingga 2023. Beberapa gempa tersebut memang tidak menimbulkan kerusakan besar, namun menjadi indikator bahwa wilayah ini terus berada dalam kondisi rawan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Situasi berubah drastis pada 18 September 2024, ketika gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang Kecamatan Kertasari, termasuk Desa Cikembang. Gempa dangkal tersebut menghasilkan guncangan kuat yang merusak lebih dari 3.600 bangunan, melumpuhkan fasilitas umum, memaksa ribuan warga mengungsi, serta menyebabkan korban luka dan korban meninggal dunia. Desa Cibeureum, Cikembang, dan Tarumajaya tercatat sebagai wilayah yang mengalami dampak terparah. Peristiwa ini mengungkap kenyataan bahwa tingkat kerentanan di beberapa desa masih tinggi akibat lemahnya mitigasi, minimnya penguatan konstruksi bangunan, serta terbatasnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Berikut ini adalah titik koordinat sumber gempa tersebut.

Tabel 1. Frekuensi Kejadian Gempa Bumi Kabupaten Bandung Dari Tahun 2018-2023

Tahun	Kekuatan	Titik Koordinat	Efek Gempa Bumi
7 September 2018	3,1 Magnitudo	koordinat 7.19 lintang selatan-107.79 bujur timur, tepatnya di darat pada jarak 19-kilometer Tenggara kabupaten Bandung kedalaman 4 Kilometer.	Tidak menimbulkan kerusakan
11 Februari 2019	4,1 Magnitudo	koordinat 7,27 lintang selatan dan 107,71 bujur timur. Tepatnya berada di darat pada jarak 17 Km Tenggara Kabupaten Bandung pada kedalaman 10 Km.	Tidak menimbulkan kerusakan
1 November 2020	4,0 Magnitudo	7,2 lintang selatan - 107.6 bujur timur. Tepatnya berada di darat pada jarak 21 km Tenggara Kabupaten Bandung, kedalaman 5 Km	Tidak menimbulkan kerusakan
7 Desember 2021	2,9 Magnitudo	koordinat 7.25 lintang selatan-107.60 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 26 km Barat Daya Kabupaten Bandung Kedalaman 3 kilometer.	Tidak menimbulkan ker Usakan
15 Maret 2022	3,6 Magnitudo	koordinat 7.26 lintang selatan-107.72 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 17 km Tenggara Kabupaten Bandung Kedalaman 1 kilometer.	Tidak menimbulkan kerusakan
28 Januari 2023	4,0 Magnitudo	koordinat 7.22 lintang selatan dan 107.59 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 23 km Tenggara Kabupaten Bandung pada kedalaman 5 km.	Kerusakan ringan pada bangunan dan struktur lainnya

Sumber: *Olahan peneliti tahun, 2025*



Gambar 2. Peta Titik Gempa Bumi Kabupaten Bandung 2024

Sumber: *Web Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandung, 2024*

Dari hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki kekuatan Magnitudo 5.0 di ikuti gempa susulan sebanyak 33 guncangan dengan episenter yang terletak pada koordinat 7,23° LS dan 107,65° BT. Gempa ini berlokasi di darat, sekitar 25 km tenggara Kabupaten Bandung, pada kedalaman 10 km di bawah permukaan tanah. Guncangan gempa yang sangat besar ini berdampak ke Kecamatan Pangalengan dan seluruh wilayah desa di Kecamatan Kertasari seperti: Desa Sukapura, Desa Resmitingal, Desa Santosa, Desa Neglawangi, Desa Cihawuk, Desa Tarumajaya, Desa Cibereum dan Desa Cikembang.

Meskipun tergolong sebagai gempa bumi dangkal yang tidak berpotensi menimbulkan tsunami, dampak yang ditimbulkan gempa di Kecamatan Kertasari sangat signifikan dan meluas (Rais, 2021).

Gempa tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur yang cukup parah, tercatat lebih dari 3.600 rumah warga mengalami kerusakan, baik rusak ringan, sedang, hingga berat. Selain itu, sebanyak 71 fasilitas pendidikan dan 89 tempat ibadah juga terdampak, sehingga aktivitas sosial, dan Pendidikan sempat lumpuh. Dari sisi kemanusiaan, gempa bumi ini berdampak langsung terhadap 10.243 kepala keluarga, atau sekitar 39.703 jiwa, yang tersebar di delapan desa. Sebagian besar dari mereka terpaksa mengungsi karena rumah yang mereka tempati mengalami kerusakan cukup parah akibat gempa bumi. Tidak sedikit bangunan yang roboh atau tidak layak huni, sehingga masyarakat harus tinggal di tempat pengungsian sementara dengan kondisi yang serba terbatas. Situasi ini menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan, hingga persoalan keamanan dan psikologis warga terdampak. Adapun sebagai berikut, tabel jumlah data penduduk terdampak gempa bumi Kecamatan Kertasari 2024:

Tabel 2. Jumlah penduduk terdampak Kecamatan Kertasari

No	Desa	Jumlah penduduk	Jumlah bangunan terdampak	Korban luka-luka	Korban meninggal dunia
1	Cibeurem	17.461	1.097	10	-
2	Cikembang	15.115	997	7	1
3	Tarumajaya	15.869	952	3	-
4	Cihawuk	9.631	532	2	-
5	Sukapura	9	20	-	-
6	Resmitingal	6.673	24	-	-
7	Santosa	6.311	5	-	-
8	Neglawangi	6.714	4	-	-

Sumber: Kecamatan Kertasari, 2024

Jika dilihat dari data dampak gempa berdasarkan wilayah desa, tiga desa yang mengalami dampak paling besar adalah Desa Cibeurem, Cikembang, dan Tarumajaya. Desa Cibeurem menjadi desa dengan dampak terparah, dengan jumlah penduduk sebanyak 17.461 jiwa, mengalami kerusakan pada 1.097 bangunan, sebanyak 10 warga di desa ini mengalami luka-luka, menjadikannya wilayah dengan jumlah korban luka tertinggi. Selanjutnya, Desa Cikembang yang memiliki jumlah penduduk 15.115 jiwa mengalami kerusakan pada 997 bangunan. Desa ini juga mencatat adanya 7 korban luka-luka dan 1 korban meninggal dunia, menjadikannya satu-satunya desa yang mengalami korban jiwa sampai meninggal dunia akibat gempa. Di urutan ketiga ada, Desa Tarumajaya yang dihuni oleh 15.869 jiwa mencatat 952 bangunan rusak serta 3 orang mengalami luka-luka. Ketiga desa tersebut memiliki karakteristik geografis dan demografis yang padat, serta bangunan-bangunan yang belum sepenuhnya tahan terhadap gempa, sehingga tingkat kerusakan dan korban menjadi lebih tinggi dibandingkan desa lainnya.

Sementara itu, lima desa lainnya yakni Cihawuk, Sukapura, Resmitingal, Santosa, dan Neglawangi mengalami dampak yang relatif lebih ringan. Misalnya, Desa Cihawuk dengan penduduk 9.631 jiwa mencatat 532 bangunan terdampak dan 2 orang mengalami luka-luka. Empat desa lainnya hanya mencatat kerusakan bangunan dengan jumlah yang sangat minim, dan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka yang tercatat. Fakta ini menunjukkan adanya variasi tingkat kerentanan dan kesiapsiagaan antardesa dalam menghadapi bencana gempa bumi. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, khususnya Badan (BPBD) Kabupaten Bandung, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait perencanaan tata ruang, penguatan struktur bangunan, serta penyuluhan dan pelatihan kebencanaan secara merata di seluruh wilayah kecamatan. Meskipun secara kekuatan gempa tidak tergolong ekstrem, namun kurangnya mitigasi dan ketahanan lingkungan terhadap bencana menjadi faktor utama tingginya dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.



Gambar 3. Dampak Fisik dan Korban Jiwa pada Gempa Bumi Cikembang 2024  
*Sumber: Instagram Adalah Kabupaten Bandung, 2024*

Pada gambar peristiwa di atas menunjukkan bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Kecamatan Kertasari, khususnya di Desa Cikembang yang sampai menimbulkan korban jiwa, bahwa daerah yang sebelumnya dianggap minim risiko ternyata memiliki potensi kerentanan yang tinggi. Kerusakan infrastruktur, terbatasnya sistem peringatan dini, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan serius dalam penanganan bencana. Dalam kondisi darurat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung memiliki peran yang sangat penting dalam menangani bencana gempa bumi, baik dalam tahap mitigasi, tanggap darurat, maupun rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana di tingkat daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan dalam mengatur, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan terhadap gempa bumi (Sopacua, 2020). Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga memiliki tugas untuk mengoordinasikan bantuan dan pemulihan pascabencana guna mempercepat proses pemulihan bagi masyarakat terdampak dengan bergerak cepat bersama dengan berbagai pihak seperti pemerintah Desa, TNI, Polri, Dinas Sosial, PMI, dan berbagai elemen Masyarakat terkait dalam melakukan evakuasi, penyaluran logistik, pendirian posko darurat serta penanganan lainnya dalam penanggulangan pascabencana tersebut (Ritonga, 2024).

Fenomena tersebut menegaskan bahwa efektivitas penanggulangan pascabencana tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada kualitas koordinasi antarinstansi, khususnya antara BPBD sebagai aktor struktural dan pemerintah desa sebagai aktor lokal yang berinteraksi langsung dengan masyarakat terdampak. Kelemahan koordinasi ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan penanggulangan bencana yang dirumuskan di tingkat kabupaten dengan implementasi operasional di tingkat desa, termasuk dalam hal distribusi bantuan, pendataan kerusakan, dan penanganan kebutuhan mendesak penyintas.

Dari kajian pustaka, penelitian mengenai koordinasi BPBD dan pemerintah desa masih terbatas dan beragam temuan. Penelitian milik (Alnizar Zagarino, 2021) menunjukkan bahwa koordinasi BPBD di Kabupaten Lumajang menghadapi kendala komunikasi dan sumber daya manusia, sementara penelitian (Hariadi, 2025) mengungkapkan bahwa koordinasi BPBD dan pemerintah desa di Kabupaten Sukabumi lebih efektif karena adanya mekanisme komunikasi rutin dan SOP jelas. Di sisi lain, penelitian (Mukarromah, 2024) menemukan bahwa partisipasi pemerintah desa justru menjadi faktor kunci keberhasilan koordinasi pascabencana di daerah pedesaan Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya variasi efektivitas koordinasi antar daerah dan mengindikasikan belum adanya model koordinasi yang konsisten dan teruji di berbagai situasi bencana.

Berdasarkan perbedaan temuan penelitian sebelumnya, terdapat gap penelitian terkait bagaimana koordinasi BPBD dan pemerintah desa berjalan pada konteks bencana gempa bumi yang bersifat mendadak dan berdampak luas seperti di Desa Cikembang pada tahun 2024. Penelitian terdahulu belum banyak membahas koordinasi pascabencana pada skala desa dengan fokus pada dinamika komunikasi, pembagian peran, serta efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam konteks geografis dan sosial yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan novelty berupa analisis mendalam mengenai mekanisme koordinasi antara BPBD Kabupaten Bandung dan pemerintah Desa Cikembang

pascabencana gempa bumi 2024, dengan menekankan aspek komunikasi krisis, kepemimpinan koordinatif, serta implementasi kebijakan lapangan. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris baru terkait faktor-faktor lokal yang memengaruhi efektivitas koordinasi, yang belum dijelaskan secara tuntas dalam studi sebelumnya.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami fenomena secara holistik sesuai konteksnya (Haki, 2024). Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman, serta dinamika sosial secara mendalam melalui kata-kata, perilaku, dan situasi alami sebagaimana dijelaskan Bondan & Taylor dalam (Abdussamad, 2021) dan (Nurhayati, 2024). Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara faktual dan sistematis mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana gempa bumi di Desa Cikembang tahun 2024. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dan menggunakan teknik triangulasi melalui wawancara semi-terstruktur yaitu bergantung dan tidak bergantung kepada pedoman (Farah Fadila, 2025), observasi langsung (Romdona, 2025), dan dokumentasi untuk memperoleh data yang kuat, relevan, dan sesuai kondisi lapangan.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu terkait relevansi peran, pengalaman, dan pengetahuan terhadap situasi penelitian sebagaimana dikutip dari (Adhimah, 2020). Informan dalam penelitian ini meliputi aktor struktural dari BPBD Kabupaten Bandung, pemerintah Desa Cikembang, tokoh masyarakat, serta warga terdampak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur untuk menggali pandangan mendalam dari para aktor kunci, observasi untuk menangkap situasi faktual pascabencana, serta dokumentasi berupa arsip, foto, dan catatan resmi sebagai pelengkap informasi.

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan lima tema panduan utama, yaitu: (1) mekanisme respons dan aktivasi peran BPBD pada fase tanggap darurat; (2) pola koordinasi antara BPBD dengan pemerintah desa dalam distribusi bantuan dan penanganan pengungsi; (3) kendala struktural dan komunikasi yang dihadapi selama proses penanggulangan; (4) keterlibatan dan respons masyarakat lokal terhadap intervensi kelembagaan; serta (5) evaluasi dan pembelajaran pascabencana dari perspektif aktor di lapangan. Setiap tema dikembangkan menjadi sejumlah pertanyaan terbuka yang bersifat fleksibel, sehingga memungkinkan informan menguraikan pengalaman dan pandangannya secara bebas tanpa dibatasi oleh pilihan jawaban yang telah ditentukan sebelumnya.

Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan secara teknis melalui dua jalur yang saling melengkapi. Pertama, triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan yang berbeda kategori yakni pejabat BPBD, aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga terdampak untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, maupun kontradiksi dalam narasi masing-masing aktor terhadap peristiwa yang sama. Kedua, triangulasi metode, yaitu dengan memverifikasi data hasil wawancara menggunakan data observasi lapangan dan dokumen resmi; apabila terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan informan dengan fakta yang teramati atau tercatat dalam dokumen, peneliti melakukan pendalaman melalui wawancara lanjutan untuk memperoleh klarifikasi. Kedua jalur triangulasi ini dilakukan secara berulang dan simultan selama proses pengumpulan data berlangsung.

Pengumpulan data dihentikan setelah tercapainya kondisi saturasi data (data saturation), yaitu titik di mana informasi yang diperoleh dari informan baru tidak lagi menghasilkan tema, kategori, atau perspektif yang secara substansial berbeda dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Pencapaian saturasi ini menjadi penanda bahwa data yang terhimpun telah cukup memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif dan kredibel, sekaligus menjadi batas metodologis yang menggantikan penentuan jumlah informan secara kaku. Terakhir, untuk analisis data peneliti menggunakan model Miles & Huberman, yang mencakup (Qomaruddin, 2024) reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang hingga diperoleh temuan yang kredibel dan valid.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Kesatuan Tindakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemerintah Desa Cikembang

Kesatuan tindakan merupakan indikator penting dalam proses penanggulangan bencana karena mengukur sejauh mana seluruh instansi terkait mampu bergerak dalam satu arah kebijakan, satu pola respons, dan satu alur koordinasi. Dalam manajemen bencana, kesatuan tindakan diwujudkan melalui keselarasan prosedur, kejelasan pembagian peran, serta kemampuan menyatukan persepsi antar-aktor dalam situasi darurat. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam penanganan gempa bumi di Desa Cikembang pada tahun 2024, mengingat kondisi geografis desa yang berada di dataran tinggi dan aksesibilitas terbatas sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Pada tahap awal, kesatuan tindakan tampak dari langkah Pemerintah Desa Cikembang dalam melakukan pengumpulan informasi awal terkait kerusakan fisik dan kebutuhan warga terdampak. Informasi ini lalu diverifikasi dan disusun menjadi laporan resmi untuk disampaikan ke BPBD Kabupaten Bandung. BPBD kemudian melakukan pendataan cepat (rapid assessment) dan menetapkan prioritas bantuan berdasarkan tingkat keparahan dampak serta kebutuhan mendesak warga. Mekanisme dua arah ini mempercepat proses situational awareness, sehingga kebijakan tanggap darurat dapat dikeluarkan dengan cepat dan tepat.



Gambar 4. Rapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dihadiri Oleh Pemerintah Desa dan Instansi lainnya dan Bagan Kolaborasi Instansi yang Terlibat  
Sumber: *Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 2024*

Salah satu wujud konkret kesatuan tindakan adalah penyelenggaraan rapat koordinasi BPBD Kabupaten Bandung yang menghadirkan Pemerintah Desa Cikembang, perwakilan kecamatan, Dinas Perkimtan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, TNI/Polri, serta organisasi relawan. Rapat tersebut membahas skala kerusakan, distribusi bantuan, serta strategi penanganan jangka pendek dan jangka menengah. Dalam rapat tersebut dipetakan bagan kolaborasi instansi yang berperan dalam penanganan bencana, di mana BPBD menjadi koordinator utama, pemerintah desa sebagai pengumpul data dan pelaksana lapangan, Perkimtan sebagai penanggung jawab verifikasi kerusakan rumah, dan relawan sebagai pendukung logistik serta tenaga bantuan.



Gambar 5. Pertemuan Rapat Progres Perbaikan/Pembangunan Rumah Rusak Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Bandung  
Sumber: *Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, 2024*

Bagan kolaborasi tersebut memperlihatkan bahwa kesatuan tindakan bukan hanya hasil dari instruksi formal, melainkan integrasi dari beragam instansi yang bergerak dalam satu kerangka koordinasi. Dengan adanya skema kolaborasi ini, setiap instansi memahami batasan tugasnya, menghindari tumpang tindih kewenangan, dan mampu memperkuat respons bencana secara simultan.

Kesatuan tindakan juga terlihat dalam rapat progres pembangunan dan perbaikan rumah rusak yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bandung bersama Pemerintah Desa Cikembang dan dinas terkait. Rapat ini memuat pembahasan mengenai kategori kerusakan (rusak berat, sedang, ringan), proses verifikasi lapangan, alokasi anggaran perbaikan melalui skema bantuan pemerintah, serta timeline pembangunan kembali. Dokumentasi berupa gambar rapat memperlihatkan adanya proses deliberatif yang terbuka antara pemerintah daerah, desa, dan pihak teknis, menunjukkan bahwa respons bencana tidak berhenti pada fase darurat, tetapi berlanjut hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara kolaboratif.

Selain penanganan fisik, kesatuan tindakan juga mencakup upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana. Pemerintah Desa Cikembang mengajukan pengadaan anggaran untuk pelatihan kebencanaan yang melibatkan BPBD sebagai narasumber utama. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi mengenai jalur evakuasi, pertolongan pertama, dan simulasi bencana. Di samping itu, desa juga mengusulkan pengadaan alat mitigasi bencana, seperti alat pemadam kebakaran, megafon, rompi relawan, senter darurat, serta peralatan evakuasi dasar. Upaya ini menunjukkan bahwa kesatuan tindakan tidak hanya berjalan saat bencana terjadi, tetapi juga dibangun dalam kerangka pencegahan sehingga masyarakat tidak tergantung penuh pada pemerintah ketika bencana datang.

The image contains two budget sheets (RAB) from the village of Cikembang, 2025. Both sheets are for the Kecamatan Kertasari. The left sheet details a budget of 8,884,488.00 for disaster mitigation and training, including items like disaster relief kits, training materials, and equipment. The right sheet details a budget of 30,000,000.00 for disaster mitigation equipment and training, including items like disaster relief kits, training materials, and equipment. Both sheets include signatures and stamps of the village head and the district disaster management agency (BPBD).

Gambar 6. Pengadaan anggaran Pelatihan dan alat Mitigasi Bencana  
 Sumber: Desa Cikembang, 2025

Posko darurat yang dibentuk pasca-gempa berfungsi sebagai pusat penyelarasan tindakan seluruh aktor, mulai dari perangkat desa, relawan lokal, BPBD, hingga komunitas pemuda desa. Melalui posko ini, berbagai kegiatan dilakukan seperti pendataan kerusakan, identifikasi kebutuhan warga, penyaluran bantuan, dan pelaporan rutin kepada BPBD. Intensitas pertemuan, kehadiran instansi beragam, dan sirkulasi informasi yang terbuka memperkuat terbangunnya *shared responsibility* antar-aktor.

Namun beberapa hambatan tetap muncul, seperti keterbatasan personel desa, ketidaksinkronan data awal akibat situasi darurat, serta adanya relawan independen yang belum sepenuhnya mengikuti prosedur BPBD. Meski demikian, hambatan ini dapat diminimalkan melalui komunikasi adaptif yang dilakukan hampir setiap hari antara pihak desa dan BPBD. Secara analitis, kesatuan tindakan yang terbangun di Desa Cikembang menunjukkan sinergi nyata antara respons cepat (*rapid response*), koordinasi struktural, koordinasi teknis, serta penguatan kapasitas masyarakat. Kolaborasi lintas sektor, dokumentasi rapat progres perbaikan rumah, mekanisme posko, serta integrasi antara kebijakan darurat dan pengadaan anggaran mitigasi memperlihatkan bahwa tindakan para pihak berorientasi pada tujuan yang sama dan saling melengkapi.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, indikator kesatuan tindakan dalam penanganan gempa bumi di Desa Cikembang dapat dikategorikan efektif. Efektivitas terlihat dari kecepatan alur informasi, kejelasan pembagian tugas, koordinasi lintas sektor melalui rapat BPBD, pelaksanaan rapat progres perbaikan rumah, serta adanya inisiatif penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pengadaan alat mitigasi. Walaupun terdapat beberapa hambatan teknis, keseluruhan proses menunjukkan konsistensi tindakan yang terarah, terstruktur, dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.

### 3.2. Komunikasi antara BPBD Kabupaten Bandung dan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Pascabencana

Komunikasi merupakan unsur fundamental dalam proses koordinasi, khususnya pada tahap pascabencana yang menuntut kolaborasi lintas-instansi secara cepat dan terstruktur. Hasibuan (2011:88) menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif harus mampu menciptakan keselarasan tindakan, kesamaan persepsi, serta arus informasi yang jelas di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam penanganan pascabencana gempa bumi di Desa Cikembang Kecamatan Kertasari, komunikasi menjadi instrumen utama yang menghubungkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung dengan Pemerintah Desa, perangkat RT/RW, dinas teknis, dan masyarakat terdampak. Dengan demikian, kualitas hubungan komunikasi antar-aktor menjadi indikator langsung terhadap efektivitas penanggulangan bencana di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, H. Uka Suska Puji Utama, pola komunikasi antara BPBD dan Pemerintah Desa Cikembang berlangsung dalam tiga mekanisme utama, yakni rapat koordinasi formal, komunikasi digital melalui grup WhatsApp, dan komunikasi lapangan dalam kegiatan verifikasi serta pendampingan. Rapat koordinasi menjadi ruang utama penyamaan persepsi antar-instansi, serta validasi data kerusakan rumah warga. Rapat ini dihadiri BPBD, Pemerintah Desa, Dinas Perkim, Dinas PUTR, Dinas Sosial, serta unsur perangkat desa. Dalam rapat evaluasi progres perbaikan rumah, setiap instansi memberikan laporan teknis perkembangan rehabilitasi rumah rusak berat, sedang, dan ringan. Melalui komunikasi formal inilah BPBD menetapkan prioritas penanganan dan menyampaikan keputusan strategis kepada Pemerintah Desa.



Gambar 7. Rapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Rapat Evaluasi Progres Perbaikan/Pembangunan Rumah Rusak Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Bandung

Selain melalui rapat, komunikasi intensif juga terjadi pada saat distribusi bantuan darurat. Pemerintah Desa Cikembang berperan sebagai perantara langsung dalam menyampaikan informasi kebutuhan warga kepada BPBD sekaligus mengoordinasikan proses pendistribusian logistik ke posko-posko penyintas. Dokumentasi lapangan memperlihatkan perangkat desa memberikan arahan serta pembagian bantuan seperti makanan siap saji, tenda, selimut, dan perlengkapan mendesak lainnya. Komunikasi pada tahap ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan tersalurkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan setiap posko.



Gambar 8. Arahan dan Pendistribusian Bantuan Oleh Pihak Desa ke Tiap Posko Darurat di Desa Cikembang

Komunikasi antar-instansi juga berperan penting dalam proses pendataan dan verifikasi kerusakan rumah warga. Data kerusakan menjadi dasar penentuan kategori bantuan perbaikan rumah, sehingga akurasi data harus dijaga melalui koordinasi antara BPBD, perangkat desa, dan dinas teknis terkait. Untuk memperkuat koordinasi tersebut, Pemerintah Desa menyusun tabel kriteria dan jumlah kerusakan rumah warga yang kemudian disampaikan kepada BPBD sebagai bahan verifikasi awal. Tabel ini berfungsi sebagai media komunikasi yang memperjelas situasi faktual di lapangan.

Tabel 3. Jumlah dan Kriteria Kerusakan Rumah Warga Desa Cikembang

No	Tingkat Kerusakkan	Jumlah Unit Rumah	Dana Perbaiki
1.	Sangat Ringan	679	Rp.1.000.000,-
2.	Ringan	95	Rp.15.000.000,-
3.	Sedang	42	Rp.30.000.000,-
4.	Berat	6	Rp.60.000.000,-

Selanjutnya, komunikasi juga tercermin dalam kegiatan layanan dukungan psikososial (LDP) yang dilakukan kepada warga penyintas gempa bumi di Desa Cikembang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan koordinasi antara BPBD, Pemerintah Desa, dan tenaga profesional yang memberikan pendampingan emosional pasca-trauma. Kunjungan lapangan untuk pengarahan dan evaluasi LDP menjadi salah satu bentuk komunikasi humanis yang dilakukan BPBD dalam membantu warga memulihkan kondisi psikologis mereka setelah kejadian bencana. Pemerintah Desa membantu mengumpulkan warga terdampak, menyampaikan informasi kegiatan, dan memastikan keberlangsungan program.



Gambar 9. Kunjungan Kegiatan Pengarahan dan Evaluasi Layanan Dukungan Psikososial Kepada Warga Penyintas Gempa Bumi Kertasari di Desa Cikembang  
*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024*

Di sisi lain, komunikasi juga terbangun melalui proses penyusunan dan pengadaan anggaran, baik untuk pelatihan kebencanaan maupun peralatan mitigasi bencana. BPBD dan Pemerintah Desa berdiskusi mengenai kebutuhan pelatihan seperti materi kesiapsiagaan, simulasi evakuasi, penggunaan alat keselamatan, dan peningkatan kapasitas relawan desa. Selain itu, komunikasi intensif dilakukan untuk menetapkan jenis alat mitigasi yang akan dibutuhkan, seperti pemadam kebakaran ringan, helm keselamatan, HT komunikasi darurat, serta peralatan evakuasi. Proses perencanaan anggaran ini berjalan dua arah: desa menyampaikan kebutuhan lapangan, sementara BPBD memberikan pertimbangan teknis dan memastikan kesesuaian dengan standar penanggulangan bencana.

Secara keseluruhan, komunikasi dalam penanggulangan pascabencana di Desa Cikembang berlangsung melalui tiga lapis pola: (1) komunikasi formal (rapat, laporan tertulis), (2) komunikasi semi-formal (koordinasi via grup WhatsApp), dan (3) komunikasi lapangan (pendampingan teknis, distribusi bantuan, layanan psikososial). Ketiga mekanisme tersebut membentuk rantai informasi yang relatif stabil, meskipun masih terdapat hambatan seperti perbedaan kecepatan respon antar-instansi teknis, keterbatasan kapasitas digital desa, serta lamanya proses verifikasi administrasi bantuan perumahan.

Jika dianalisis menggunakan indikator komunikasi Hasibuan (2011:88), maka pola komunikasi BPBD dan Pemerintah Desa memenuhi sebagian besar aspek, yakni: (a) adanya aliran informasi jelas dan tersusun, (b) hubungan komunikasi dua arah yang berjalan konsisten, dan (c) keterbukaan informasi terkait progres pemulihan, distribusi bantuan, dan kegiatan pendampingan. Namun efektivitasnya belum sepenuhnya maksimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas desa dalam pelaporan digital dan birokrasi verifikasi antardinas. Berdasarkan temuan lapangan dan analisis teori, indikator komunikasi dalam koordinasi BPBD Kabupaten Bandung dengan Pemerintah Desa Cikembang dapat dikategorikan cukup efektif. Komunikasi telah berjalan melalui berbagai saluran, melibatkan lintas-instansi, serta mendukung pelaksanaan penanggulangan pascabencana secara umum. Kendati demikian, beberapa hambatan teknis masih memerlukan perhatian, seperti keterlambatan informasi, kapasitas pelaporan desa, dan birokrasi verifikasi. Dengan demikian, efektivitas komunikasi berada pada tingkat yang baik, tetapi masih dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

### **3.3. Pembagian Tugas Koordinasi Lapangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ke Pemerintah Desa Cikembang**

Pembagian tugas merupakan elemen inti dalam koordinasi, karena tanpa pembagian tugas yang jelas proses penanganan pascabencana berpotensi mengalami tumpang tindih, kekosongan peran, atau ketidaktepatan respons. Hal ini sejalan dengan pandangan Hasibuan (2011:88) yang menegaskan bahwa efektivitas koordinasi tercapai melalui kejelasan pembagian tugas, kesesuaian peran, dan keterhubungan antar-aktor dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks penanggulangan pascabencana gempa bumi di Desa Cikembang, pembagian tugas antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung dan Pemerintah Desa Cikembang menunjukkan dinamika yang kompleks, mencerminkan adanya perbedaan antara struktur formal dan praktik lapangan yang adaptif.

Menurut Kepala Pelaksana BPBD, H. Uka Suska Puji Utama, BPBD tidak melakukan penunjukan langsung terhadap Pemerintah Desa, tetapi meminta desa mengajukan nama koordinator lapangan untuk kemudian diformalkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. Pernyataan ini menunjukkan bahwa BPBD mengedepankan mekanisme struktural dan administratif dalam pembagian tugas, sehingga legitimasi koordinator lapangan memiliki dasar hukum yang jelas. Pernyataan tersebut sejalan dengan prinsip Hasibuan bahwa pembagian tugas harus dilakukan secara sistematis agar koordinasi berjalan sesuai jalur hierarkis organisasi. Melalui SK Bupati, pembagian tugas dipastikan memiliki kepastian hukum, arah kerja yang jelas, serta pola pelaporan yang berjenjang.

Hasil wawancara lain, terutama dari Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD (Bapak Huda Iman Azhari), menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Cikembang bergerak cepat melakukan pendataan melalui RT, RW, dan LINMAS sebelum adanya arahan formal dari BPBD. Hal ini mengindikasikan bahwa proses koordinasi di tahap awal bencana tidak menunggu mekanisme struktural bekerja, melainkan bergantung pada reaksi spontan dan kemampuan desa. Dalam analisis peneliti, temuan ini menggambarkan *koordinasi emergent* dimana struktur informal terbentuk terlebih dahulu sebelum struktur formal bergerak. Pada fase darurat, desa menjadi aktor utama karena kedekatannya dengan

warga, sehingga pembagian tugas bersifat situasional dan adaptif. Fenomena ini menunjukkan bahwa koordinasi tidak sepenuhnya bergerak *top-down*, tetapi juga *bottom-up*.

Ketidaksinkronan terlihat ketika Kepala Desa Cikembang (Tatang Ridwan Turlina) menyatakan bahwa penunjukan koordinator lapangan *ditetapkan langsung* oleh BPBD melalui SK Bupati, tanpa adanya musyawarah. Sekretaris Desa (Cuncun Mulyana) bahkan menegaskan bahwa mereka sempat menolak penunjukan tersebut karena keterbatasan waktu untuk turun ke lapangan. Perbedaan narasi ini menunjukkan adanya *gap komunikasi* terkait mekanisme pembagian tugas. Secara prinsip koordinasi Hasibuan, kondisi ini menunjukkan kelemahan pada indikator “keselarasan persepsi” dan “kejelasan arus informasi”. Dengan demikian, pembagian tugas secara formal tidak sepenuhnya dipahami secara seragam oleh semua pihak di tingkat desa.

Wawancara dengan BPD dan perangkat desa menunjukkan bahwa meskipun SK menunjuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD sebagai koordinator lapangan, pelaksanaan teknis di lapangan justru dilakukan oleh RT, RW, dan perangkat desa seperti Kasi Kesejahteraan (Asep Irawan). Mereka lebih sering melakukan pendataan rumah rusak, pemantauan kebutuhan warga, hingga pendampingan administrasi rehabilitasi. Fenomena ini menunjukkan adanya *dual structure coordination*: (1) Koordinasi administratif (formal) melalui SK Bupati. (2) Koordinasi operasional (lapangan) melalui aktor-aktor lokal yang bekerja secara adaptif. Menurut teori Hasibuan, pembagian tugas yang efektif tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh kemampuan unit pelaksana menjalankan fungsi teknis sesuai kondisi lapangan. Dalam konteks Desa Cikembang, fungsi koordinasi lebih efektif di level RT/RW karena merekalah yang memahami dinamika sosial dan geografis wilayah.

Ketua RW 09 (Eris Permana) menjelaskan bahwa RW menjadi aktor terdepan sejak hari pertama bencana: melakukan pendataan, memvalidasi kebutuhan warga, dan mendampingi proses administrasi hingga masa rehabilitasi. RW menjalankan fungsi koordinasi teknis yang paling konsisten dan dekat dengan realitas lapangan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan koordinasi pascabencana sangat dipengaruhi oleh *grassroot actors*. RW dan RT menjadi simpul komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa, dan peran ini sejalan dengan indikator koordinasi Hasibuan tentang “keterhubungan unit kerja” dan “keselarasan fungsi”.

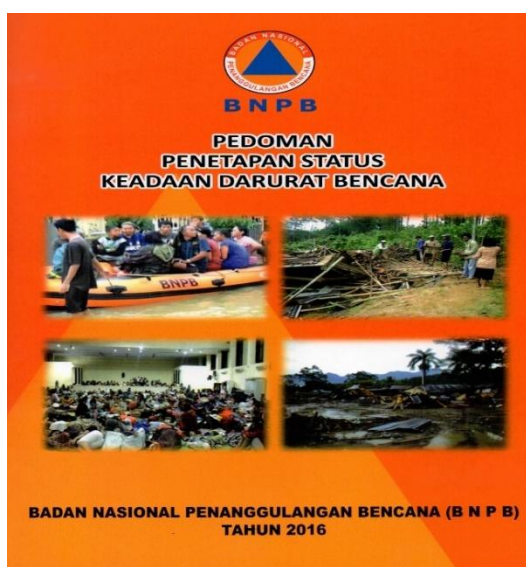
Secara keseluruhan, mekanisme pembagian tugas dalam koordinasi penanggulangan pascabencana gempa bumi di Desa Cikembang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara struktur formal dan praktik lapangan, namun keduanya tetap berkontribusi terhadap efektivitas penanganan bencana. Secara formal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung menetapkan koordinator lapangan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai bentuk legitimasi dan pemenuhan prinsip pembagian tugas sebagaimana ditegaskan oleh Hasibuan (2011:88). Namun, temuan lapangan mengungkap bahwa efektivitas koordinasi justru lebih banyak ditopang oleh mekanisme adaptif, yaitu ketika pemerintah desa menunjuk koordinator teknis dari perangkat desa, khususnya Kasi Kesejahteraan dan unsur RW/RT, yang memiliki kedekatan sosial dan pemahaman langsung terhadap kondisi warga. Inisiatif lokal ini menjadikan proses pendataan, pemantauan, dan penyampaian informasi berlangsung lebih cepat dan responsif. Dengan demikian, meskipun terdapat ketidaksinkronan antara prosedur administratif dan praktik operasional, model koordinasi hibrida yang terbentuk menggabungkan struktur formal dengan fleksibilitas aktor lokal di lapangan telah mampu memastikan kelancaran penanganan pascabencana. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian tugas yang efektif tidak hanya bergantung pada legalitas formal, tetapi juga pada kemampuan adaptasi dan pemanfaatan aktor-aktor lokal yang memahami konteks sosial masyarakat terdampak.

### 3.4. Disiplin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemerintah Desa Cikembang

Disiplin dalam penanggulangan pascabencana gempa bumi di Desa Cikembang merupakan fondasi penting yang menentukan keberhasilan koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung dan Pemerintah Desa. Disiplin berfungsi sebagai pedoman kerja yang menjaga keteraturan, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memastikan bahwa setiap pihak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai aturan yang telah ditetapkan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa keberadaan pedoman tugas menjadi dasar utama yang mengarahkan seluruh proses penanganan pascabencana, mulai dari pendataan kerusakan, penyaluran bantuan, hingga pelibatan masyarakat.

Dengan demikian, disiplin tidak hanya menjadi unsur administratif, tetapi juga menjadi instrumen praktis yang menjamin bahwa mekanisme koordinasi berjalan sesuai prosedur yang baku.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pelaksana BPBD dan pejabat struktural lainnya, terlihat bahwa pedoman tugas yang menjadi acuan disiplin bersumber dari regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, serta pedoman teknis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Tahun 2016. Pedoman-pedoman tersebut kemudian diturunkan menjadi arahan teknis bagi pemerintah kecamatan maupun perangkat desa. Hal ini mencerminkan pola koordinasi yang bersifat top-down, di mana BPBD menjadi sumber utama kebijakan dan desa berperan sebagai pelaksana di lapangan. Ketaatan desa terhadap arahan ini mencerminkan disiplin struktural yang konsisten dengan teori koordinasi Hasibuan.



Gambar 10. Buku pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2016

*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, 2025*

Temuan di tingkat desa memperlihatkan bahwa perangkat desa, RT, RW, dan lembaga kemasyarakatan telah melaksanakan pedoman tugas tersebut secara konsisten, khususnya dalam pendataan rumah rusak, pelaporan korban terdampak, dan penyaluran bantuan. Desa mengikuti format pendataan yang telah ditetapkan BPBD, sehingga data yang dihasilkan bersifat seragam dan mudah diverifikasi. Proses ini menunjukkan adanya kedisiplinan kolektif yang memastikan bahwa seluruh tindakan di lapangan berjalan sesuai jalur yang telah ditentukan. Namun demikian, observasi juga menunjukkan bahwa penerapan pedoman belum sepenuhnya merata di kalangan masyarakat. Situasi darurat dan tekanan psikologis membuat sebagian warga kesulitan mengikuti prosedur secara konsisten, sehingga perangkat desa harus mengambil peran lebih aktif dalam memastikan pedoman tetap dilaksanakan.

Di sisi lain, wawancara dengan perangkat BPBD dan Pemerintah Desa mengungkap bahwa meskipun pedoman tugas telah disosialisasikan melalui rapat koordinasi dan simulasi kesiapsiagaan, ruang bagi desa untuk melakukan penyesuaian sesuai kondisi lokal masih terbatas. BPBD lebih menekankan disiplin teknis daripada adaptasi kontekstual, sehingga desa bergantung pada instruksi yang bersifat struktural. Hal ini menyebabkan koordinasi berjalan efektif dari sisi keteraturan prosedural, tetapi kurang fleksibel dalam mengakomodasi dinamika lokal. Dengan kata lain, disiplin telah dijalankan, namun sifatnya masih dominan administratif dan belum sepenuhnya integratif.

Secara keseluruhan, kedisiplinan BPBD dan Pemerintah Desa Cikembang dalam penanggulangan pascabencana telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan pedoman teknis yang berlaku. Disiplin

ini berhasil menciptakan koordinasi yang tertib, seragam, dan sesuai prosedur dalam pendataan kerusakan, penyaluran bantuan, serta pelaporan kondisi lapangan. Namun efektivitas disiplin ini masih bergantung pada kepatuhan terhadap instruksi dari BPBD, sementara ruang inovasi desa masih terbatas. Dengan demikian, disiplin dalam koordinasi pascabencana di Desa Cikembang dapat dikatakan telah efektif dari sisi prosedural, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam memberdayakan desa secara mandiri untuk menyesuaikan pedoman dengan kondisi sosial dan geografis lokal.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antara BPBD Kabupaten Bandung dan Pemerintah Desa Cikembang dalam penanggulangan pascabencana gempa bumi dapat diuraikan melalui empat dimensi berikut.

1. Pertama, kesatuan tindakan. Koordinasi antara kedua pihak telah berjalan melalui mekanisme rapat sebagai sarana utama untuk menyamakan persepsi, menyusun rencana, dan mengambil keputusan bersama terkait penanganan pascabencana. Meskipun demikian, pelaksanaan rapat tersebut masih berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya terjadwal secara konsisten, sehingga kesatuan tindakan yang terbangun masih bersifat situasional dan responsif terhadap kebutuhan mendesak di lapangan.
2. Kedua, pembagian tugas. Dalam dimensi ini ditemukan adanya perbedaan pandangan antara BPBD dan Pemerintah Desa. Di satu sisi, BPBD menyatakan bahwa belum terdapat penunjukan formal koordinator lapangan. Di sisi lain, Pemerintah Desa menyatakan bahwa penunjukan tersebut telah dilakukan oleh BPBD dan diperkuat melalui SK Bupati, dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD sebagai pihak yang tercantum di dalamnya. Namun dalam praktiknya, koordinasi lapangan lebih banyak didelegasikan kepada RT/RW di bawah tanggung jawab Kepala Seksi Pemerintahan, sehingga meskipun secara formal SK penunjukan telah ada, pelaksanaan di lapangan cenderung bersifat informal dengan mengandalkan struktur lokal yang lebih dekat dengan masyarakat.
3. Ketiga, disiplin. Pedoman tugas dalam penanggulangan pascabencana secara umum telah tersedia dengan mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum utama. Namun demikian, pada tingkat desa masih terdapat keterbatasan yang cukup signifikan, yaitu belum tersedianya regulasi atau pedoman tugas khusus yang ditetapkan langsung oleh BPBD Kabupaten Bandung untuk dijadikan acuan operasional. Kondisi ini menyebabkan Pemerintah Desa hanya menjalankan tugas berdasarkan arahan dari BPBD tanpa memiliki buku pedoman teknis yang dapat digunakan secara mandiri di lapangan.
4. Keempat, komunikasi. Koordinasi dalam aspek komunikasi dinilai belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan, yaitu keterlambatan dalam penyampaian laporan, pendistribusian bantuan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, serta terjadinya miskomunikasi antara BPBD, Pemerintah Desa, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme pengarah dan evaluasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam memastikan kelancaran koordinasi, sehingga masih diperlukan perbaikan sistematis dalam alur komunikasi antarlembaga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Adhimah, S. (2020). Peran orang tua dalam menghilangkan rasa canggung anak usia dini (studi kasus di desa karangbong rt. 06 rw. 02 Gedangan-Sidoarjo). *Jurnal Pendidikan Anak*, 9(1), 57–62.
- Akbar, R., & Desiani, R. (2018). Implementasi business intelligence menentukan daerah rawan gempa bumi di Indonesia dengan fitur geolokasi. *JEPIN: Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika*, 4(1), 30–35.
- Alnizar, D. C., & Zagarino. (2021). Peran badan penanggulangan bencana daerah dalam manajemen bencana erupsi gunung semeru di kabupaten lumajang. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(5), 762–773.

- Angelina Br Bukit, F., & Manurung. (2025). Analisis risiko bencana alam akibat pengembangan infrastruktur pariwisata di kawasan Toba Caldera Geopark: Studi kasus potensi longsor, banjir dan erupsi vulkanik. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(2), 808–815.
- Azizah, M., & Kurniawan, R. (2021). Kajian risiko bencana berdasarkan jumlah kejadian dan dampak bencana di Indonesia periode tahun 2010–2020. *PENDIPA Journal of Science Education*, 6(10), 35–40.
- Az-Zahra Aynul Qolbi, & Cahyani, N. (2024). Pengaruh sosialisasi mitigasi bencana sesar lembang terhadap pemahaman risiko dan mitigasi bencana pada remaja di zona sesar lembang. *Jurnal Pendidikan Non Formal*, 1(4), 8. <https://doi.org/10.47134/jpn.v1i4.566>
- Fadila, F., & Sari, S. (2025). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Wawancara. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(7), 13446–13449.
- Haki, U. (2024). Strategi pengumpulan dan analisis data dalam penelitian kualitatif pendidikan. *Jurnal Inovasi dan Teknologi Pendidikan*, 3(1), 1–19.
- Hariadi, A. Y. (2025). Implementasi kebijakan peraturan wali kota sukabumi nomor 83 tahun 2021 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah kota sukabumi. *Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Publik*, 1(3), 327–355.
- Mukarromah, L. (2024). Evaluasi implementasi desa tangguh bencana: Studi kasus di Jawa Tengah dan peran teknologi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 370–382.
- Namyra, S. (2025). Manajemen stres dan kecemasan dalam situasi gempa bumi. *Jurnal Riksa Cendikia Nusantara*, 1(3).
- Nurhayati, N. A. (2024). *Metodologi penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Qomaruddin, Q. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84.
- Qurrotaini, L., & Nofitasari, N. (2020). Implementasi pendidikan mitigasi bencana alam gempa bumi dalam pembelajaran IPS SD. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(1), 37–44.
- Rais, L. N. (2021). Analisis bencana gempa bumi dan mitigasi bencana di daerah kertasari. *Jurnal Samudra Geografi*, 4(2), 14–19.
- Rismawati, R. (2021). *Panduan keselamatan saat gempa bumi*. Diva Press.
- Ritonga, A. (2024). Tinjauan kebijakan: Evaluasi efektivitas upaya penanggulangan bencana di desa ciwangi. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 102–127.
- Romdona, S. S. (2025). Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan kuesioner. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3(1), 39–47.
- Sabtaji, A. (2020). Statistik kejadian gempa bumi tektonik tiap provinsi di wilayah Indonesia selama 11 tahun pengamatan (2009–2019). *Buletin Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika*, 1(7), 31–46.
- Setiawan, I. N. (2022). Klasterisasi wilayah rentan bencana alam berupa gerakan tanah dan gempa bumi di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Official Statistics*, 669–676.
- Sopacua, Y. (2020). Sosialisasi mitigasi bencana oleh badan penanggulangan bencana daerah kota Ambon. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 7(1), 1–17.
- Suparno, N. O. (2025). Pengaruh aktivitas tektonik dan vulkanik terhadap evolusi bentuk lahan pulau Sulawesi: Review literatur (2018–2024). *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 4(2), 4438–4452.
- Syafitri, Y. B. (2019). Analisis pergeseran lempeng bumi yang meningkatkan potensi terjadinya gempa bumi di Pulau Lombok. *Konstan: Jurnal Fisika dan Pendidikan Fisika*, 4(2), 139–146.

**Halaman Ini Dikosongkan**